



# REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024



**TAHUN 2021**

**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK  
KELAS IA**

Website : [www.pn-gresik.go.id](http://www.pn-gresik.go.id) / email : pn.gresik@ymail.com  
Telp. (031) 51159931 – Fax. (031) 51159931  
Jl. Raya Permata No. 06 Gresik

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Review Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Negeri Gresik Kelas 1A Tahun 2021.

Pengadilan Negeri Gresik/ Hubungan Industria Kelas 1A adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung yang berada di provinsi Jawa Timur.

Review Renstra Pengadilan Negeri Gresik/ Hubungan Industria Kelas 1A Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Gresik/ Hubungan Industria Kelas 1A, yang disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Maka perlunya review terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 Pengadilan Negeri/ Hubungan Industria Gresik Kelas 1A Tahun 2021 adalah untuk lebih disesuaikan dengan kebijakan yang diambil oleh pimpinan Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI , Cetak Biru (Blue Print) pembaharuan peradilan 2010-2035, Review Renstra Mahkamah Agung RI dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, diantaranya :

- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015, tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2014, tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, transparan, serta memenuhi rasa keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik/ Hubungan Industria Kelas 1A.

Gresik, 3 Febuari 2022

Ketua Pengadilan Negeri/  
Hubungan Industrial Gresik Kelas IA



WIWIN ARODAWANTI, S.H.,M.H

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1.Kondisi Umum .....	1
1.2.Potensi dan Permasalahan .....	1
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN .....	6
2.1. Visi .....	6
2.2.Misi.....	6
2.3.Tujuan.....	7
2.4.Sasaran Strategis.....	7
2.5.Indikator Kinerja dan Target Kinerja .....	7
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	8
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik .....	8
BAB IV. PENUTUP .....	10

### LAMPIRAN :

1. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA
2. TABEL 1 : POTENSI DAN PERMASALAHAN
3. TABEL 2 : SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
4. TABEL 3 : HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA
5. MATRIK RENCANA STATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA TAHUN 2021
6. SK PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. KONDISI UMUM**

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang mendukung Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menjadi kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Gresik/ Hubungan Industrial Kelas 1A. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Negeri Gresik/ Hubungan Industrial Kelas 1A dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

### **1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN (FAKTOR INTERNAL)**

#### **Kekuatan (*Strength*)**

Kekuatan Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Berdasarkan SK KMA 144 2007 tentang keterbukaan informasi Pengadilan, di Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A terdapat sarana informasi kepada masyarakat berupa infrastruktur IT.
2. Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A merupakan Pengadilan Kelas 1A tidak hanya menangani perkara Pidana dan Perdata melainkan juga menangani perkara Hubungan Industrial, sehingga Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik memiliki Hakim-Hakim ahli perkara-perkara tersebut.
3. Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A adalah merupakan unsur muspida pemerintah daerah dan sekaligus merupakan kawal depan Pengadilan Tingkat Pertama di Provinsi Jawa Timur.
4. Pengadilan Negeri/ Hubungan Industri; Gresik Kelas 1A memiliki jumlah total karyawan sebanyak 49 orang, dianggap cukup mampu menangani kasus yang jumlahnya cukup besar, mengingat potensi sumber daya manusia yang cukup kompeten dan tersedianya sarana prasarana yang cukup memadai.
5. Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A, pada tahun 2016 telah mendapatkan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum "A" (Excellent) sehingga mendorong semua pegawai Pengadilan Negeri Gresik terus meningkatkan semangat kerja yang lebih baik.
6. Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A juga menyediakan fasilitas ruang menyusui, pemeriksaan kesehatan dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bagi pencari keadilan.

### **Kelemahan (*Weakness*)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A dirinci dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Administrasi perkara secara elektronik sudah dapat diakses secara cepat oleh masyarakat, utamanya pencari keadilan.
  - Belum meratanya kemampuan sumber daya manusia/pegawai dan belum meratanya volume pekerjaan tiap persentase yang menggambarkan volume pekerjaan sesungguhnya.
  - Sidang dengan cara *teleconference*, apabila sarana dan prasarananya tidak/kurang memadai menyebabkan proses persidangan tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri/ Hubungan Industria Gresik Kelas 1A, sehingga menggunakan tenaga honorer untuk bisa membantu kebutuhan yang ada sesuai kemampuan masing-masing.
  - Personil di Pengadilan Negeri Gresik Kelas 1A belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A dan menerapkan SOP yang ada, tetapi dengan semangat kerja yang tinggi berupaya terus berpedoman pada SOP.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum maksimalnya penerapan evaluasi penilaian kinerja.
  - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
  - Dengan penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi diharapkan seluruh pegawai Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik mampu melaksanakan kinerja tersebut.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan
  - Masih banyak diperlukan fasilitas-fasilitas perkantoran seperti printer, labtop, PC, maupun scanner untuk mendukung lancarnya kegiatan perkantoran.
  - Jumlah Hakim 19 orang dan Hakim Ad Hoc 2 orang, dengan jumlah ruang sidang sebanyak 6 ruangan selanjutnya harus ditambah lagi 1 sd 2 ruang sidang lagi.

### **Peluang (*Opportunities*)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Adanya website Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A yang memberikan informasi kepada masyarakat dan pencari keadilan sangat membantu sekali dalam hal alur proses perkara yang ada di Pengadilan Negeri Gresik Kelas 1A .

- Pengadilan Negeri Gresik/Hubungan Industrial Kelas 1A merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Gresik maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
    - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja semua pegawai untuk tetap meningkatkan semangat kerja.
    - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang diikuti Pengadilan Negeri Gresik/ Hubungan Industrial Kelas 1A untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
  3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
    - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal maupun eksternal.
  4. Aspek Sarana dan Prasarana
    - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Gresik/ Hubungan Industrial Kelas 1A berupa internet, website Pengadilan Negeri Gresik Kelas 1A, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan putusan pengadilan melalui website pengadilan.
    - Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin meningkat, memungkinkan pekerjaan membuat laporan secara manual dapat dikerjakan oleh Sistem Informasi.

#### **Tantangan yang dihadapi (*Threats*)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Gresik/ Hubungan Industrial Kelas 1A yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Belum tersedianya suatu alat yang mengukur kepuasan pengguna jasa pengadilan. Hanya sebatas (IKM) Index Kepuasan Masyarakat melalui kuisisioner.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Personil di Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A yang belum seluruhnya menguasai sistem teknologi informasi.
  - Kurang seringnya pembinaan, pelatihan, sosialisasi baik Internal dan Eksternal kepada semua pegawai agar semakin baik dan meningkatkan wawasan dan etos kerjanya.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
  
4. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Pengadilan Negeri Gresik/ Hubungan Industrial Kelas 1A berupaya akan mengembalikan kepercayaan public dan mempermudah masyarakat dan pencari keadilan dengan menyiapkan sarana prasarana yang mudah dan baik, baik Teknologi Informasi dan sarana fisik lainnya.
  - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan



## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN**

Rencana Strategis Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan cetak biru pembaharuan pengadilan 2010-2035 & rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

#### **2.1. VISI**

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.

Visi Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A adalah mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS 1A YANG AGUNG”

#### **2.2. MISI**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.

### **2.3 TUJUAN**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A adalah sebagai berikut:

1. Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

### **2.4. SASARAN STRATEGIS**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A dalam Tahun 2020 – 2024.

### **2.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK

Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A dalam mewujudkan visi, misi, tujuan yang ditetapkan pada tahun 2020 – 2024, menetapkan empat sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang mengacu pada Mahkamah Agung RI yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis yang pertama yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A adalah Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, yang mana untuk menilai tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A dalam hal penyelesaian perkara melalui indikator kinerjanya yaitu terdiri dari;
  - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
  - b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
  - c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
  - d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
  - e. Persentase Putusan yang Dipublikasi Kedalam Website
  - f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Sasaran strategis yang kedua yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A adalah Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, yang mana untuk menilai tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A dalam hal Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara melalui indikator kinerjanya yaitu
  - a. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Tahun Berjalan
  - b. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak
  - c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

3. Sasaran strategis yang ketiga yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A adalah Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, yang mana untuk menilai tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A dalam Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui indikator kinerjanya yaitu terdiri dari :
  - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
  - b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
  - c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
  - d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum ( Posbakum )
  
4. Sasaran strategis yang keempat yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A adalah Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, yang mana untuk menilai tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Gresik dalam hal Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan melalui indikator kinerjanya yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A telah menyelesaikan pembuatan Review Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Gresik Kelas 1A tahun 2021 (2020-2024) diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Review Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang maupun tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

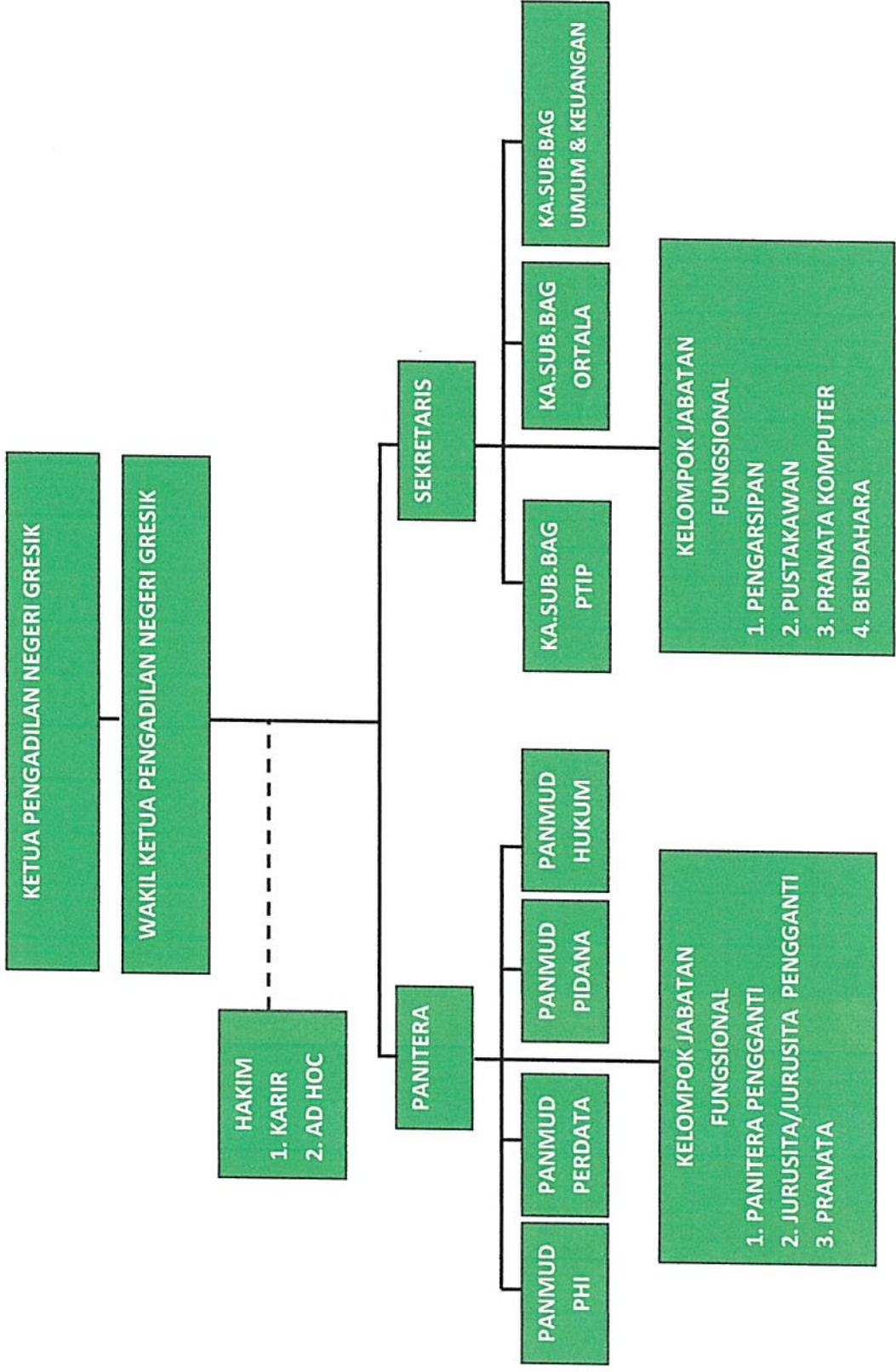
Review Rencana stretegis (Renstra) Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka atas kemungkinan perubahan. Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Gresik Kelas 1A dapat terwujud dengan baik.

Demikian Semoga dengan Review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A tahun 2021 (2020-2024) akan lebih meningkatkan pencapaian prestasi terutama sebagai pelayan masyarakat pencari keadilan.

**Lampiran : Reviu Rencana Strategis Tahun 2021 (2020– 2024)**

1. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA
2. TABEL 1 : POTENSI DAN PERMASALAHAN
3. TABEL 2 : SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
4. TABEL 3 : HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA
5. MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA TAHUN 2021
6. SK PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



No	Nama	Jabatan
1	WIWIN ARODAWANTI,SH.MH	Ketua
2	I.A SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, SH.MH	Wakil Ketua
3	ATING BUDIMAN.,SH.	Panitera
4	SUPRAYITNO, SH.	Sekretaris
5	SUGENG AGUNG SISWOYO,SH.MH	Panitera Muda Perdata
6	KUS TRIA PALUPI, SH.MH	Panitera Muda Pidana
7	AGUS YULIANTO, SH.,M.Hum	Panitera Muda Hukum
8	MEILANY KUSUMA NINGRUM, SH.	Panitera Muda PHI
9	SUBANDRI,SH	Ka.Sub.Bag. PTIP
10	LAZUARDHI ZEIN ENDRINATA, SE, SH	Ka.Sub.Bag. Umum & Keuangan
11	ANDI WILSAN,ST	Ka.Sub.Bag. Kepegawaian & ORTALA



TABEL 1. POTENSI DAN PERMASALAHAN

KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN
<p>1. Berdasarkan SK KMA 144 2007 tentang keterbukaan informasi Pengadiln, di Pengadiln Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A . terdapat sarana informasi kepada masyarakat berupa infrastruktur IT.</p>	<p>1. Aspek Proses Peradilan:                      ✓ Administrasi perkara secara elektronik sudah dapat diakses secara cepat oleh masyarakat, utamanya pencari keadilan                      ✓ Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan Masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadiln Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A                      ✓ Belum meratanya kemampuan sumber daya manusia/pegawai dan belum meratanya volume pekerjaan tiap persentase yang menggariskan volume pekerjaan sesungguhnya.</p>	<p>1. Aspek Proses Peradilan:                      ✓ Adanya website Pengadiln Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A yang Memberikan informasi kepada masyarakat.                      ✓ Pengadiln Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A, merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah, pemerintah kota Maupun pemerintah provinsi Jawa Barat.</p>	<p>1. Aspek Proses Peradilan :                      Sudah tersedianya suatu alat atau aplikasi yang mengukur kepuasan pengguna jasa pengadiln, melalui Aplikasi IKM/IPK dan Survey harian.</p>
<p>2. Pengadiln Negeri Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A merupakan Pengadiln Kelas 1A tidak hanya menangani perkara Pidana dan Perdata melainkan juga menangani perkara Hubungan Industrial, sehingga Pengadiln Negeri Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A memiliki Hakim-Hakim ahli perkara-perkara tersebut.</p>	<p>2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan:                      ✓ Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadiln Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A, sehingga menggunakan tenaga honorer untuk bisa membantu kebutuhan yang ada sesuai kemampuan masing-masing.                      ✓ Personil di Pengadiln Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadiln Negeri Gresik Kelas 1A dan menerapkan SOP yang ada, tetapi dengan semangat kerja yang tinggi berupaya terus berpedoman pada SOP.</p>	<p>2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan:                      ✓ Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja semua pegawai untuk tetap meningkatkan semangat kerja.                      ✓ Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang diikuti Pengadiln Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.</p>	<p>2 Aspek Sumber Daya                      Aparatur Peradilan:                      ✓ Personil di Pengadiln Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A yang belum seluruhnya menguasai sistem teknologi informasi.                      ✓ Kurang seringnya pembinaan, pelatihan, sosialisasi baik Internal dan Eksternal kepada semua pegawai agar semakin baik dan meningkatkan wawasan dan etos kerjanya.</p>

<p>3. Pengadiln Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah merupakan unsur muspida pemerintah daerah dan sekaligus merupakan kawal depan Pengadiln Tingkat Pertama di Provinsi Jawa Timur.</p>	<p>3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan:          ✓ Belum maksimalnya penerapan evaluasi penilaian kinerja.          ✓ Belum adanya sistem <i>reward</i> &amp; <i>punishment</i> untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.</p>	<p>3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan :          ✓ Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal maupun eksternal.</p>	<p>3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan :          ✓ Belum adanya sistem <i>reward</i> &amp; <i>punishment</i> untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.</p>
<p>4. Pengadiln Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memiliki jumlah total karyawan sebanyak 49 orang, dianggap cukup mampu menangani kasus yang jumlahnya cukup besar, mengingat potensi sumber daya manusia yang cukup kompeten dan tersedianya sarana prasarana yang cukup memadai.</p>	<p>4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan:          ✓ Dengan penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi diharapkan seluruh pegawai Pengadiln Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mampu melaksanakan kinerja tersebut.</p>	<p>4. Aspek Sarana dan Prasarana:          ✓ Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadiln Negeri Gresik Kelas IA berupa internet, website Pengadiln Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan putusan pengadilan melalui website pengadilan.          ✓ Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin meningkat, memungkinkan pekerjaan membuat laporan secara manual dapat dikerjakan oleh Sistem Informasi.</p>	<p>4 Aspek Sarana dan Prasarana:          ✓ Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi pada Pengadiln Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas IA berupa Internet, Website dan lainnya nadalah merupakan proses perbaikan dalam upaya mempercepat alur masyarakat atau para pihak yang berperkara di Pengadiln Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas IA utamanya pencari keadilan.          ✓ Pengadiln Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas IA berupaya mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan dalam rangka peningkatan dalam pelayanan pada masyarakat utamanya pencari keadilan.          ✓ Pengadiln Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas IA berupaya akan mengembalikan kepercayaan public dan mempermudah masyarakat dan pencari keadilan dengan menyiapkan sarana prasarana</p>

<p>5. Pengadiln Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, pada tahun 2016 telah mendapatkan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum "A" (Excellent) sehingga mendorong semua pegawai Pengadiln Negeri Gresik terus meningkatkan semangat kerja yang lebih baik.</p> <p>6. Pengadiln Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas IA juga menyediakan fasilitas ruang menyusui, pemeriksaan kesehatan dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bagi pencari keadilan.</p>	<p>5. Aspek Sarana dan Prasarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Anggaran yang diterima Pengadiln Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.</li> <li>✓ Jumlah Hakim 19 orang dan Hakim Ad Hoc 2 orang, dengan jumlah ruang sidang sebanyak 6 ruangan selanjutnya harus ditambah lagi 1 sd 2 ruang sidang lagi.</li> </ul>	
--	---	--

TABEL 2. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	<p>a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perkara Yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria sisa perkara mengacu pada SK KMA No 214/kma/sk/xii/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung</li> <li>• Suarat edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) lingkungan peradilan</li> <li>• Sisa perkara tahun sebelumnya</li> </ul> <p><math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang jarus diselesaikan = jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Penurunan sisa perkara
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan : Berdasarkan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 12, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>e. Persentase putusan yang dipublikasi ke dalam Website</p>	<p><math display="block">\text{realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Dipublikasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Putus}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan : Putusan yang sudah dipublikasi adalah putusan yang sudah diupload dalam website</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPAN Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus <math>\geq 80</math></li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Tahun Berjalan	<p>realisasi = <math>\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang sudah diminutasi}}{\text{Jumlah perkara putus}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :            Sesuai Surat Keputusan KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju/Para Pihak	<p><math>\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100</math></p> <p>Catatan :            Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<p><math>\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100</math></p> <p>Catatan :            Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Proses Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor Pengadilan ( setting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya )</li> </ul> </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>c. Persentase permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Perkara</p>	<p>Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang di selesaikan x 100          Jumlah perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran</li> <li>• Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Voluntair isbat nikah dalam pelayanan terpadu</li> <li>• Identitas Hukum : Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas</li> <li>• Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Sipil</li> </ul>		
	<p>d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum</p>	<p>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum          ----- x 100%          Jumlah pencari keadilan golongan tertentu</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan ( marjinal )</li> </ul>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>



4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase perkara perdata ditindak lanjuti ( dieksekusi )	<p>Jumlah putusan perkara Perdata sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan Eksekusi</p> $\frac{\text{Jumlah putusan perkara Perdata yang BHT}}{\text{Jumlah putusan perkara Perdata sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan eksekusi</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	---	----------	-------------------------------------

**TABEL 3. HUBUNGAN SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - PHI	100 % 100 % 100 %	92 % 100 % 100 %	92% 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - PHI	95 % 100 % 100 %	87,6 % 91,7 % 94,1 %	92 % 91,7 % 94,1 %
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	95 % 95 % 100 %	77% 83 % 92 %	81 % 87 % 92 %
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5 %	0 %	0 %
		e. Persentase Putusan yang Dipublikasi ke dalam Website	100 %	100 %	100 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	93,69%	100%
		2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Tahun Berjalan	100 %
b. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak	100 %			100 %	100 %
c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	80 %			12.5 %	15.62 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	5 %	0 %	0 %

	Terpinggirkan	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %	92 %	92 %
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	42%	42 %

**MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024  
PENGADILAN NEGERI GRESIK KELAS 1A  
TAHUN 2021**

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Gresik Yang Agung

Misi :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gresik.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Gresik
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Gresik

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target				Strategis				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama yang tepat waktu	Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama	95	150.245.000
		b. Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu	100		b. Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu	95	95	95	95					
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	100		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	95	95	95	95					
		• Banding			• Banding									
		• Kasasi			• Kasasi									
		• PK			• PK									
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	5	5	5					

	e.Persentase Putusan yang dipublikasi kedalam website	100	100	100	100	100	100	e.Persentase Putusan yang dipublikasi kedalam website	100
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100	80	80	80	80	80	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100	100	100	100	100	100	a. Persentase Penyelesaian minutası perkara tahun berjalan	100
	b. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak	100	100	100	100	100	100	b. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak	100
	c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100	100	100	100	100	100	c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	5	5	5	5	5	5	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	5
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0	0	0	0	0	0	b.Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0

		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100	100	100	100	100					
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100		Pos Bantuan Hukum	Honor Advokat/Pengacara Piket	100	31.200.000
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100	100	100	100					

DITETAPKAN : GRESIK

PADA TANGGA : 4 Februari 2022

Ketua Pengadilan Negeri/  
Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

  
Wiwin Arodawanti, S.H., M.H.  
NIP. 19650420 199212 2 001



## **PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS I.A**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA  
NOMOR : W.14.U.31/ 59.1/OT.01.1/1/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024  
PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA  
TAHUN 2022**

**KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan rencana Pembangunan Jangka Panjang (2010-2035) ;
  - b. Bahwa sehubungan adanya Reviu atas Indikator Kinerja Utama dan untuk Penetapan Kinerja Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A perlu mereviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A Tahun 2020-2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
  - 2. Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 ;
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
  - 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
  - 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
  - 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09.M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
  - 10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI ;
  - 11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A Nomor : W14 U31/ 49.1 / OT.01.1/1/2018 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A

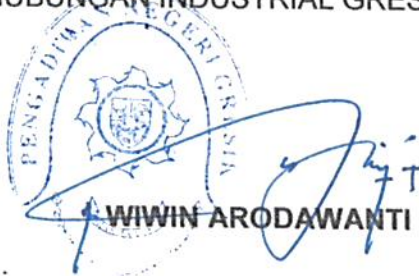
## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS I.A TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024 PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS I.A
- Pertama** : Bahwa berdasarkan Reviu Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A, sebagai acuan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja maka perlu dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A Tahun 2020 – 2024 dilakukan reviu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Kedua** : Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2020 – 2024 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1.A disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur ;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan Di : Gresik

Pada Tanggal : 19 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI/  
HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS I.A



WIWIN ARODAWANTI